

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kelurahan Sarangan Kabupaten Magetan

I. Abidurrahman¹, M. Muktiali²

^{1,2} Universitas Diponegoro, Indonesia

Article Info:

Received: 13 March 2018
Accepted: 23 April 2018
Available Online: 4 June 2018

Keywords:

Tourism, Community Participation, Participation Forms, Participation Levels, Participation Factors

Corresponding Author:

Irham Abidurrahman
Diponegoro University,
Semarang, Indonesia
irhamabidurrahman@gmail.com

Abstract: *The problems local government has been facing in the development of Sarangan Tourism Village was backed by the existence of many weakness, misunderstanding, and conflicts as it seen through the low citizen participation. This includes a minimum sense of responsibility towards the development of existing tourism sites for instance. All because the respective local community already get used with the system of development given from the higher lawmakers (top down process) so that people perceive such tendency to become passive and moreover only wait for initiatives from external stakeholders. The main purpose of this study is to examine forms and level of community participation and to determine all possible factors which has been influencing community participation activity in Sarangan Tourism Village development program. This research uses quantitative descriptive analysis by deploying questionnaire as information digging tool supported by qualitative data in which will be extracted from interview process.*

Based on the result of the research, it is found that community participation in the research area is related to the participatory forms of social funding, collective physical activity, self-property donation, and softskill training session, in which majority of people dominantly participate in the social funding forms, followed by self-property donation, collective physical activity, and softskill training session as it's counted in order. Overall the level of community participation in Sarangan Tourism Village is at the second level of Sherry Arnstein's eight participation degrees, specifically mentioned as therapy level which also belongs to non-participation category. In addition, there is a strong correlations between internal factors of income levels, external factors of community leaders, local governments, and village officials on the level of community participation in all development stages that includes the stage of planning, implementation, and evaluation.

Copyright © 2018 JTPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

Abidurrahman, I., & Muktiali, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kelurahan Sarangan Kabupaten Magetan. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 7(2), 87-96.

1. PENDAHULUAN

Saat ini industri pariwisata telah menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar dan merupakan sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia. Peningkatan jumlah destinasi dan investasi yang stabil dalam pembangunan pariwisata telah mengubah pariwisata sebagai salah satu sektor penting dalam kemajuan sosial ekonomi suatu negara melalui hasil devisa, penciptaan lapangan pekerjaan secara masif, serta sebagai katalis pembangunan infrastruktur. Tentunya dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengembangan pariwisata adalah salah satu alternatif ideal dalam pengembangan ekonomi serta sumberdaya masyarakat lokal di berbagai daerah potensial.

Adanya konsep pariwisata berbasis masyarakat memberikan harapan dan peluang kepada penduduk lokal untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam maupun manusia guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Partisipasi masyarakat merupakan hak, bukan kewajiban, sehingga intinya adalah sikap sukarela dari masyarakat untuk membantu keberhasilan sebuah program pembangunan (Alexander, 2002). Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan dinamika aktivitas yang berskala kecil semata, namun perspektifnya dapat dilihat sebagai konteks kerjasama masyarakat secara menyeluruh dimana masyarakat terlibat aktif sebagai *stakeholder* kunci yang tentunya lebih memahami kebutuhan wilayah mereka secara komprehensif (Adi, 2008). Inti dari pengembangan dan pengelolaan desa wisata yang bersifat partisipatif adalah mengembalikan rasa kepemilikan potensi-potensi wisata tersebut kepada masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat terlibat sejak pemikiran awal, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara, tentunya potensi-potensi permasalahan akan semakin tinggi kemungkinannya untuk timbul dimana untuk mengatasi masalah tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab dari otoritas pemerintahan setempat, namun keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolannya juga sangat diperlukan (Bryson, 2004).

Potensi pengembangan desa wisata telah disadari oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, yang pada wilayahnya dikenal memiliki lebih dari lima potensi wisata tersembunyi, serta kawasan wisata khusus yang cukup dikenal di Jawa Timur yaitu Telaga Pasir Sarangan. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud) Kabupaten Magetan, mulai tahun 2011 telah dicanangkan program pengembangan desa wisata secara khusus dengan objek utamanya adalah Telaga Pasir Sarangan di Kelurahan Sarangan, serta Desa Wisata Sumberdodol di Kecamatan Panekan. Program tersebut merupakan arahan langsung dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dengan dukungan berupa alokasi dana sebesar 100 juta per desa untuk pengembangan infrastruktur serta sarana pendukung lainnya. Pengembangan desa wisata tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun industri pariwisata baik wisata alam maupun budaya, dan konsep tersebut tidak akan terlepas dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang saling berkontribusi satu sama lain berdasarkan kompetensi yang dikuasai, salah satunya adalah kontribusi dan partisipasi aktif masyarakat dari desa itu sendiri (Verhagen, 1980).

Berdasarkan keresahan-keresahan yang diungkapkan beberapa anggota masyarakat pada temuan awal observasi, ditemukan asumsi-asumsi awal bahwa koordinasi dan kerjasama antara subjek utama pembangunan yaitu masyarakat setempat dengan pihak-pihak eksternal seperti pemerintah daerah/provinsi dan pihak swasta masih belum kuat. Hal tersebut bisa berdampak buruk apabila tidak segera diketahui akar permasalahan yang selama ini menjadi hambatan utama. Maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai seperti apa partisipasi masyarakat beserta pihak eksternal sejauh ini dalam upaya pengembangan potensi wisata yang ada di wilayah Kelurahan Sarangan.

Seiring berjalannya waktu, aktivitas pengembangan desa wisata tersebut tentunya juga membutuhkan pengawasan dalam hal pengelolaan serta pemeliharaan infrastruktur oleh pihak-pihak yang berkompeten, dan masyarakat diharapkan dapat mandiri dalam berkegiatan. Dalam kaitannya dengan kasus tersebut maka terdapat permasalahan pokok yang akan dikaji lebih lanjut dalam studi ini yaitu *"Seperti apa bentuk, tingkatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan"*. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan pokok yang nantinya akan dikaji lebih lanjut dengan menggunakan metode dan alat analisis yang relevan sehingga dapat memberikan kesimpulan dan rekomendasi mengenai apa saja bentuk, tingkatan, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan.

2. DATA DAN METODE

Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Kelurahan Sarangan Kabupaten Magetan merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2008) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada positivisme dan filsafat ilmiah empiris, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji seperti apa peran partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini dikatakan sebagai pendekatan deskriptif. Data-data yang didapatkan kemudian akan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan metode pembobotan dengan menggunakan Skala Likert. Hasil analisis mengenai peran partisipasi masyarakat ini nantinya berupa identifikasi aktivitas dilihat dari indikator bentuk partisipasi, tingkatan partisipasi, dan faktor-faktor pendukung terciptanya partisipasi tersebut. Dari sini dapat terlihat partisipasi seperti apa yang sedang, telah, dan akan dilakukan masyarakat dalam mendukung program pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan. Untuk penentuan responden, penelitian ini menggunakan teknik *simple cluster sampling proportional* dengan Rukun Warga (RW) sebagai dasar dari pembagian klaster. Selanjutnya sampel yang akan digunakan dihitung dengan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2008) sehingga dari perhitungan rumus tersebut maka muncul 92 responden dihitung dari jumlah seluruh populasi Kelurahan Sarangan yaitu 1096 KK, dimana responden-responden tersebut tersebar merata di empat lingkungan Rukun Warga sejumlah 23 responden per RW.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Mengenai Eksistensi Program Desa Wisata

Partisipasi masyarakat merujuk kepada keterlibatan seorang individu secara mental dan emosional dalam sebuah komunitas/kelompok yang membuat individu tersebut memiliki keinginan untuk berkontribusi terhadap tujuan bersama dan bertanggungjawab atas pencapaian-pencapaian yang telah didapatkan (Prabhakar, 2015). Persepsi masyarakat yang dimaksud disini termasuk data-data mengenai persepsi eksistensi program desa wisata, persepsi perkembangan desa wisata, motivasi untuk ikut berpartisipasi, persepsi keberadaan pertemuan rutin, serta intensitas masyarakat dalam mengikuti pertemuan yang membahas program pengembangan desa wisata tersebut. Setiap kategori terbagi menjadi 3 pilihan jawaban yang telah disaring dan ditetapkan berdasarkan temuan awal pada saat observasi. Secara urut dari kategori pertanyaan pertama hingga terakhir, frekuensi A mewakili hasil jawaban sebagai berikut; Sangat Tahu, Sangat Berkembang, Kesadaran/Inisiatif Pribadi, 2x Pertemuan atau Lebih, dan Selalu Hadir. Frekuensi B mewakili hasil jawaban sebagai berikut; Cukup Tahu, Cukup Berkembang, Tanpa Alasan jelas/Ikut-ikutan, 1x Pertemuan, dan Jarang Hadir. Frekuensi C mewakili hasil jawaban sebagai berikut; Tidak Tahu, Tidak Berkembang, Karena Terpaksa, Tidak Ada Pertemuan, dan Tidak Pernah Hadir. Hasil temuan di lapangan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Persepsi Masyarakat Mengenai Eksistensi Program Desa Wisata (Analisis, 2018)

No.	Kategori Pertanyaan Persepsi Masyarakat	Frekuensi						Jumlah	
		A	%	B	%	C	%	n	%
1.	Persepsi Eksistensi Program Desa Wisata	9	10%	57	62%	26	28%	92	100%
2.	Persepsi Perkembangan Desa Wisata	5	5%	95	95%	0	0%		
3.	Motivasi Masyarakat dalam Berpartisipasi	66	72%	26	28%	0	0%		
4.	Persepsi adanya Pertemuan Rutin Desa Wisata	19	21%	22	24%	51	55%		
5.	Intensitas dalam Mengikuti Pertemuan	8	9%	13	14%	71	77%		

Bentuk Partisipasi Sumbangan Uang, Tenaga, Harta Benda, dan Keterampilan

Untuk mengetahui bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam program pengembangan desa wisata digunakan analisis deskriptif kuantitatif distribusi frekuensi. Data-data yang diperoleh mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat berupa: uang, tenaga, harta benda, dan keterampilan akan diolah dalam bentuk persentase distribusi frekuensi sehingga akan diketahui bentuk partisipasi masyarakat mana yang dominan dalam proses yang terjadi di lapangan (Soelaiman, 1980).

Dalam praktik pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan, salah satu bentuk partisipasi yang diimplementasikan adalah berupa sumbangan/iuran bersama. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, iuran yang dibayarkan oleh masyarakat ternyata khusus hanya untuk pengembangan lingkungan rukun warga masing-masing, atau untuk iuran paguyuban bagi yang menjadi anggota aktif, dan bukan untuk kepentingan desa wisata secara langsung. Pemerintah Kabupaten Magetan secara spesifik tidak pernah memutuskan standar tertentu untuk warga masyarakat setempat terkait dengan iuran rutin yang ditujukan bagi kepentingan pengembangan desa wisata. Nominal iuran yang diberikan pun beragam di masing-masing lingkungan/paguyuban, berkisar antara Rp. 5.000,- hingga Rp. 20.000,- per bulannya. Maka dari itu, klasifikasi nominal iuran yang ditetapkan pada penelitian ini adalah kombinasi dari iuran lingkungan dan iuran paguyuban, nominalnya berkisar antara kurang dari Rp. 10.000,- sampai dengan di atas Rp. 50.000,- dalam kurun waktu satu bulan.

Dalam kasusnya di Kelurahan Sarangan, bentuk partisipasi tenaga dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu; 1) Partisipasi hanya ketika tradisi bersih desa diselenggarakan satu kali setahun Hari Jumat Pon di Bulan Syuro; 2) Partisipasi hanya ketika ada swadaya pembangunan/perbaikan infrastruktur lingkungan rukun warga; 3) Partisipasi ketika tradisi bersih desa jumat pon dan swadaya pembangunan/perbaikan infrastruktur di lingkungan rukun warga masing-masing; 4) Partisipasi ketika tradisi bersih desa jumat pon dan seremonial bersih desa yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, dua hari setelah tradisi bersih desa selesai dilakukan oleh masyarakat, serta; 5) Berpartisipasi dalam seluruh kegiatan fisik yang ada. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, tendensi partisipasi tenaga yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sarangan memang masih berdasar kepada pola pikir kepentingan lingkungan masing-masing. Terbukti dari data-data yang dihimpun, frekuensi tertinggi responden memberikan pernyataan bahwa mereka menyumbang kontribusi tenaga pada saat kegiatan tradisi bersih desa jumat pon dan ketika ada kegiatan untuk membangun/memperbaiki infrastruktur di lingkungan rukun warga masing-masing. Dua kegiatan tersebut adalah kegiatan mandiri dan swadaya dari masyarakat masing-masing lingkungan, mengingat tidak adanya campur tangan pemerintah kabupaten dalam prosesnya.

Harta benda menjadi salah satu alternatif bentuk partisipasi yang dapat diberikan untuk mendukung program pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan. Dalam kasusnya di Kelurahan Sarangan, bentuk partisipasi dibagi menjadi empat klasifikasi sebagai berikut; 1) Peminjaman alat-alat perkakas; 2) Penyediaan tempat/ruangan untuk melangsungkan pertemuan, serta; 3) Penyediaan makanan ringan dan minuman selama proses pertemuan berlangsung. Persentase masyarakat yang memberikan sumbangan harta benda paling besar adalah sumbangan berupa alat-alat kerja/perkakas saat kerja bakti. Sumbangan harta benda tersebut diberikan mayoritas pada tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu ketika ada kegiatan swadaya masyarakat dalam membangun/memperbaiki infrastruktur tertentu di lingkungan masing-masing, ataupun ketika kegiatan bersih desa jumat pon sedang diselenggarakan. Kelompok masyarakat yang termasuk dalam frekuensi tersebut berasal dari kalangan warga biasa dan juga beberapa warga yang menjabat sebagai pengurus harian dari beberapa paguyuban wisata.

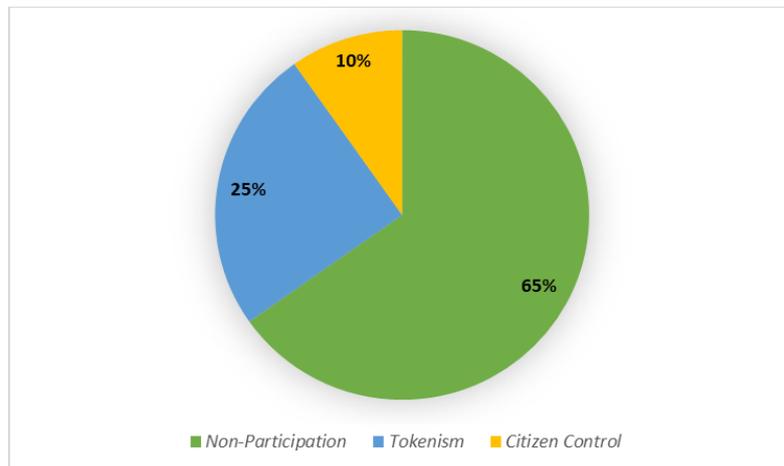
Terdapat berbagai pelatihan keterampilan yang telah/sedang diberikan oleh pemerintah setempat maupun beberapa anggota masyarakat yang berkompeten dalam bidangnya, seperti contoh; 1) Pelatihan Wirausaha untuk UMKM industri souvenir/oleh-oleh khas; 2) Pelatihan Wirausaha bagi Paguyuban Pedagang Wisata Sarangan (PPWS); 3) Pelatihan untuk para tenaga pemandu wisata, serta; 4) Pelatihan bagi para pengemudi perahu/pemilik kuda wisata. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Sarangan secara individu belum pernah memberikan sumbangan partisipasi berupa pelatihan keterampilan kepada para pelaku wisata yang ada. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kelompok masyarakat yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan desa wisata secara luas. Meskipun mayoritas masyarakat belum pernah berpartisipasi dalam bentuk memberikan pelatihan keterampilan, terdapat sejumlah 10% atau sebanyak 9 orang memberikan pernyataan bahwa mereka pernah memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat terkait dengan aktivitas kegiatan pariwisata di Kelurahan Sarangan.

Tabel 2. Distribusi Bentuk Partisipasi Uang, Tenaga, Harta Benda, Keterampilan (Analisis, 2018)

No.	Kategori	Frekuensi				Jumlah	%
		Berpartisipasi	%	Tidak Berpartisipasi	%		
1.	Partisipasi Uang	92	100%	0	0%	92	100%
2.	Partisipasi Tenaga	92	100%	0	0%		
3.	Partisipasi Harta Benda	49	53%	43	47%		
4.	Partisipasi Keterampilan	10	11%	82	89%		

Tingkatan Partisipasi Masyarakat

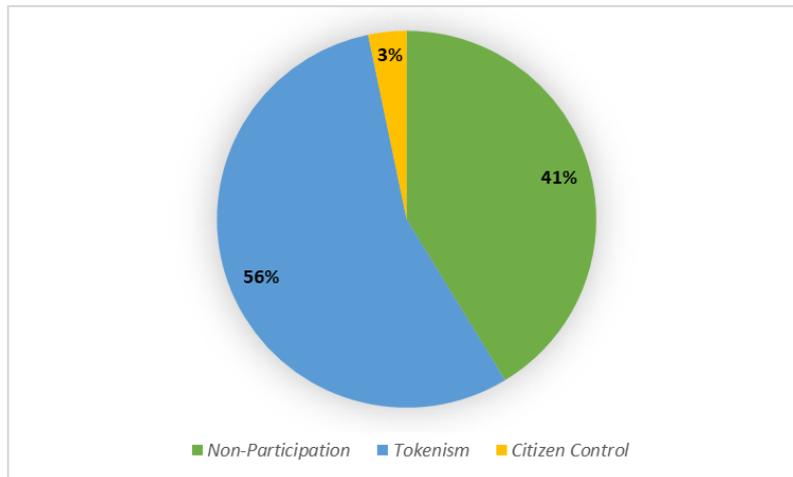
(Cohen & Uphoff, 1980) menyatakan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada suatu program pembangunan terdiri atas: tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, serta tahap pemanfaatan hasil dan evaluasi. Tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan menurut teori berada pada tingkat *therapy*, dimana pada tingkatan ini masyarakat belum sepenuhnya diikutsertakan ataupun diberikan informasi mengenai adanya program-program atau kegiatan tertentu terkait dengan pengembangan desa wisata dari pemerintah setempat (Arnstein, 1969). Tingkat partisipasi pada tahapan ini termasuk rendah karena masih tergolong dalam derajat partisipasi *non-participation*. Tahap-tahap dalam proses pembangunan di Kelurahan Sarangan sering mengalami tumpang tindih, dalam artian dalam sekali rapat pertemuan bersama warga bisa terjadi langsung beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keunikan ini tentu dapat mengurangi efektifitas pertemuan yang dilaksanakan karena terlalu banyak informasi yang harus diterima dan dipahami oleh masyarakat, serta topik pembahasan yang luas sehingga menyulitkan masyarakat untuk memilah informasi yang sesuai.

Gambar 1. Persentase Tingkatan Partisipasi Tahap Perencanaan (Analisis, 2018)

Pada tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan, masyarakat di seluruh rukun warga sebagian besar berada pada kategori *non-participation*, yang menunjukkan bahwa dalam tahapan ini secara keseluruhan masih sangat minim adanya partisipasi langsung dari masyarakat setempat. Selain itu, tingkatan partisipasi responden pada tahap ini belum mencapai artian partisipasi yang sesungguhnya, dimana wewenang yang dimiliki masyarakat tidak sebanding dengan wewenang yang dipegang oleh pemerintah kabupaten, hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang masuk ke dalam tingkat *tokenism*. Terdapat pula kelompok masyarakat yang masuk ke dalam kategori *citizen power* yaitu sebesar 10% atau setara dengan 9 orang. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jabatan struktural seperti

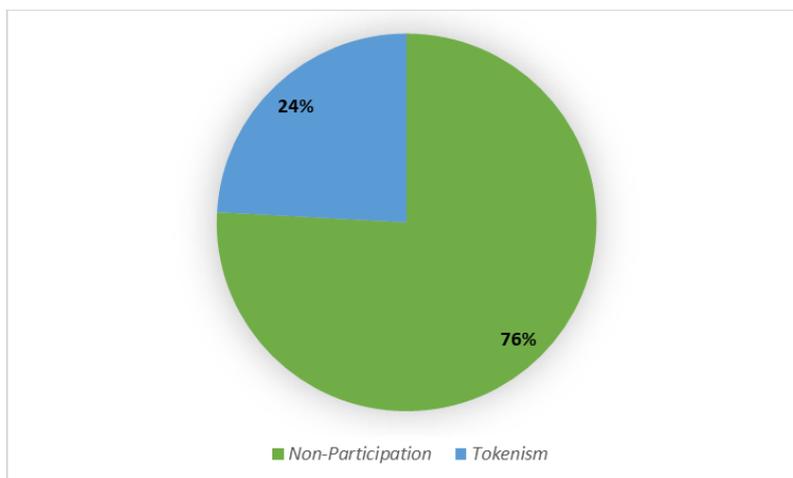
pamong desa dan pengurus harian paguyuban wisata. Masyarakat terpilih ini merupakan beberapa tokoh penting yang kerap dipanggil sebagai perwakilan warga ketika ada undangan pertemuan dengan pemerintah untuk membahas pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan.

Gambar 2. Persentase Tingkatan Partisipasi Tahap Pelaksanaan (Analisis, 2018)



Merujuk kepada gambar diatas, partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan termasuk ke dalam kategori *non-participation* tingkatan *therapy* dengan jumlah persentase sebesar 41% atau sebanyak 38 orang. Berdasarkan data yang didapatkan dari para responden, kondisi *therapy* menjadi suatu keadaan dominan dimana pemerintah ataupun pamong desa belum sepenuhnya melibatkan keseluruhan masyarakat dalam pelaksanaan program desa wisata di wilayah setempat, meskipun secara informasi dan sosialisasi kegiatan sudah tersebar untuk kalangan tertentu. Masyarakat umum selama ini cenderung terlihat sebagai pelaku wisata yang pasif. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan pun selama ini tendensinya bukan untuk pengembangan desa wisata secara spesifik, namun berlandaskan kepada semangat gotong-royong untuk meningkatkan kualitas lingkungan rukun warga masing-masing.

Gambar 3. Persentase Tingkatan Partisipasi Tahap Pemanfaatan Hasil dan Evaluasi (Analisis, 2018)



Berdasarkan data yang ditemukan, tahapan pemanfaatan dan evaluasi program ini belum sepenuhnya diikuti secara aktif oleh masyarakat, bahkan adanya kegiatan evaluasi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh mayoritas responden. Sebanyak 76% atau setara dengan 66 responden dengan jelas mendukung pernyataan tersebut yang termasuk dalam kondisi *non-participation*. Pada kondisi ini masyarakat tidak diberi pemberitahuan mengenai adanya pertemuan ataupun diundang secara khusus, sehingga dalam hal masukan mengenai penambahan maupun perbaikan sarana prasarana yang berasal dari kelompok responden tersebut belum terdengar oleh pemerintah kabupaten/pamong desa/pejabat terkait

secara langsung. Saran-saran yang diberikan pun hanya terbatas pada kegiatan rapat rutin yang diadakan oleh setiap Rukun Tetangga (RT) dalam kurun waktu satu kali pertemuan setiap bulannya.

Pada tahap ini tidak ditemukan responden yang mencapai level *citizen power*, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku aktif dari masyarakat masih belum dominan dalam rangka membahas penilaian program/kegiatan pengembangan desa wisata setempat. Masyarakat masih berkuat dalam level *non-participation* dan *tokenism* yang memperlihatkan kondisi kemandirian yang belum sempurna, serta memperkuat fakta mengenai ketidakpastian adanya timbal balik dari hasil negosiasi antar masyarakat dengan pemerintah, dan juga belum adanya pendelegasian kewenangan tertentu kepada perwakilan masyarakat dalam evaluasi hasil pembangunan. Meskipun begitu, temuan di lapangan menunjukkan kemauan tinggi masyarakat untuk guyub terlihat dari adanya pertemuan rutin skala RT yang dilakukan setiap bulan dalam rangka saling memberi masukan mengenai solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan, namun bukan secara spesifik membahas pengembangan desa wisata.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Pada bagian ini peneliti akan menganalisis dua hal mengenai hubungan faktor internal dan faktor eksternal dengan tingkat partisipasi masyarakat di setiap tahapan proses pembangunan desa wisata. Faktor internal meliputi usia, mata pencaharian, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan (Dalimunthe, 2007). Faktor eksternal meliputi pengaruh dari tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten, dan pamong desa (Sunarti, 2003). Berdasarkan uji tabulasi silang dan uji korelasi Somers'd (Kriesniati, Yuniarti, & Nohe, 2013), dapat disimpulkan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan terkait pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan dipengaruhi oleh faktor eksternal tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten, dan pamong desa. Faktor internal yang memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat hanya berasal dari tingkat pendapatan di tahapan pelaksanaan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa usia produktif dan sangat produktif sejauh ini masih menjadi kategori usia yang paling tinggi partisipasinya. Faktor usia tidak mempengaruhi tingkatan partisipasi masyarakat pada seluruh tahapan karena kelompok masyarakat dalam kategori tidak produktif ternyata juga sedikit banyak memberikan kontribusi meskipun hanya berupa pemikiran, dana, dan pelatihan keterampilan khusus, bukan tenaga. Sehingga dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa usia tidak memiliki pengaruh atas kemauan berpartisipasi masyarakat setempat. Tidak ada yang membedakan antara kemauan partisipasi dari usia produktif atau tidak produktif, kedudukannya sama rata.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat dengan mata pencaharian non-pertanian, dalam kasus ini sebagian besar merupakan pekerjaan sampingan, masih menjadi kelompok yang paling tinggi partisipasinya. Fakta tersebut kontradiktif dengan pendapat yang dikemukakan oleh sejumlah ahli dimana masyarakat dengan pekerjaan tetap cenderung akan lebih berpartisipasi aktif (Bakri, Mudikdjo, Suratmo, & Partoatmodjo, 1992). Sehingga dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian tidak memiliki pengaruh atas kemauan berpartisipasi masyarakat setempat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan tinggi sejauh ini masih menjadi kategori yang paling aktif berpartisipasi. Meskipun begitu, faktor pendapatan masyarakat tidak mempengaruhi tingkatan partisipasi pada seluruh tahapan pembangunan dikarenakan kelompok masyarakat dalam kategori pendapatan sedang ternyata juga sedikit banyak memberikan kontribusi meskipun dana iuran yang diberikan nominalnya agak sedikit lebih kecil. Sehingga dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan tidak memiliki pengaruh atas kemauan berpartisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan dan evaluasi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan rendah sejauh ini masih menjadi kategori yang paling aktif berpartisipasi. Meskipun begitu, faktor pendidikan cenderung tidak mempengaruhi partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan dikarenakan kelompok masyarakat dalam kategori pendidikan menengah dan tinggi ternyata juga sedikit banyak memberikan kontribusi meskipun hanya berupa pemikiran dan ajakan-ajakan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan kelebihan

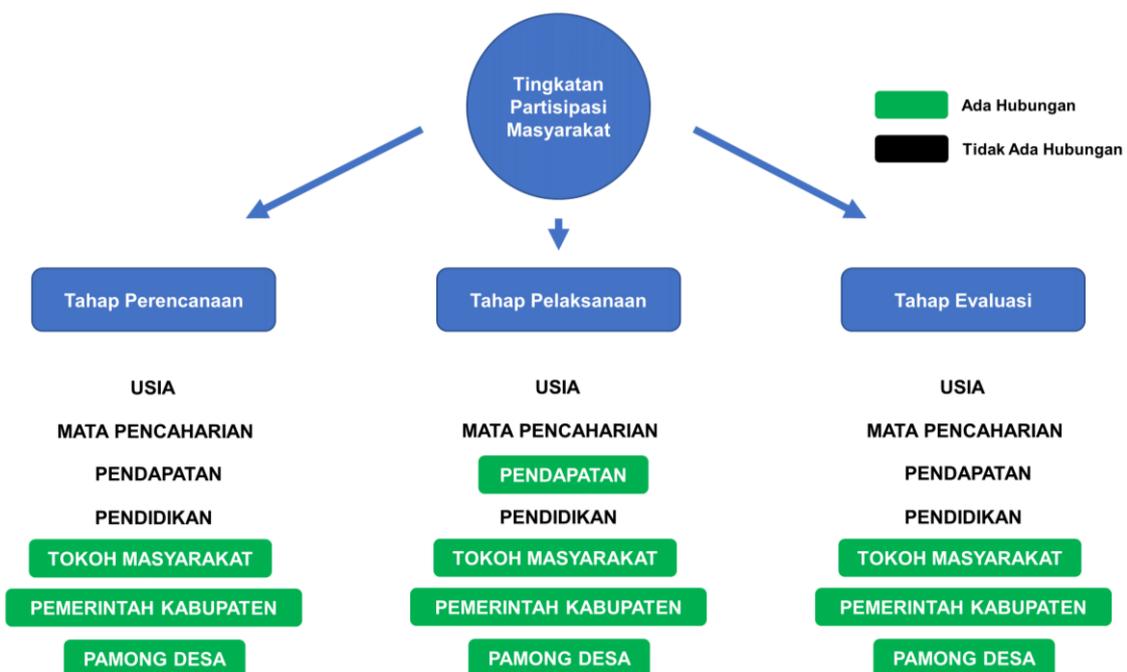
pengetahuan yang mereka miliki. Sehingga dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh atas kemauan berpartisipasi masyarakat setempat.

Faktor tokoh masyarakat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat setempat. Peran tokoh masyarakat di Kelurahan Sarangan sejauh ini berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakatnya, dan faktanya di lapangan semakin tokoh/sesepuh memberikan ajakan untuk berpartisipasi dalam sebuah program/kegiatan maka masyarakat akan dengan sendirinya tergerak untuk memberikan partisipasi sesuai dengan porsi dan kemampuan masing-masing, begitu pula sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat memiliki pengaruh atas kemauan berpartisipasi masyarakat setempat.

Faktor pemerintah kabupaten memberikan pengaruh kepada tingkat partisipasi masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pihak pemerintah kabupaten sejauh ini sudah sering mengajak beberapa perwakilan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program pengembangan desa wisata seperti pertemuan rutin satu tahun sekali, pertemuan dengan dinas pariwisata provinsi, maupun kegiatan-kegiatan tahunan lainnya. Eksistensi pendekatan dari pemerintah tersebut menunjukkan tingginya intensitas partisipasi dari para perwakilan masyarakat saja yaitu pamong desa dan beberapa pengurus aktif paguyuban wisata. Sayangnya, pelibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan secara keseluruhan masih berada pada level rendah dan perlu untuk dilakukan pendekatan yang lebih intens agar semua masyarakat dapat bersama-sama memelihara dan memanfaatkan potensi desa wisata secara maksimal. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki pengaruh cukup kuat atas kemauan berpartisipasi masyarakat setempat, serta sifat hubungannya adalah hubungan positif (berbanding lurus).

Faktor pamong desa berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pihak pamong desa sejauh ini masih kurang mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif, baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Rendahnya intensitas ajakan dari pamong desa tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh kepada rendahnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas program pengembangan desa wisata. Sehingga dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pamong desa memiliki pengaruh atas kemauan berpartisipasi masyarakat setempat namun pengaruhnya masih rendah, serta sifat hubungannya adalah

Gambar 4. Hubungan antara Tingkat Partisipasi dengan Faktor Internal dan Eksternal (Analisis, 2018)



4. KESIMPULAN

Tingkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan dapat dilihat dari hasil penilaian di setiap tahapan pembangunan. Mulai dari tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat sebagian besar masih berada pada tingkatan *non-participation*, meskipun ada pula sebagian kecil yang masuk ke dalam kategori *tokenism* dan *citizen control*. Untuk tingkat partisipasi pada tahapan pelaksanaan program/kegiatan, masyarakat sebagian besar masih berada pada kategori *non-participation*, kemudian tersebar merata pada kategori *tokenism* dan *citizen control*. Pada tahapan pemanfaatan hasil dan evaluasi tingkatan partisipasinya sebagian besar berada dalam kategori *non-participation*, kemudian tersebar merata dalam kategori *tokenism*. Tidak ada masyarakat yang masuk ke dalam kategori *citizen control*. Sehingga secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan berada pada tingkat kedua dari delapan tangga partisipasi Arnstein yaitu berada pada tingkatan *therapy* yang masuk dalam kategori *non-participation*.

Faktor-faktor internal terdiri dari usia, mata pencaharian, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan analisis tabulasi silang, hanya faktor tingkat pendapatan pada tahapan pelaksanaan yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan. Nilai rata-rata korelasi yang muncul mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel bebas tingkat partisipasi dan variabel terikat faktor internal berada pada kategori hubungan sangat rendah.

Faktor-faktor eksternal terdiri dari tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten, dan pamong desa. Berdasarkan analisis tabulasi silang, faktor tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten, dan pamong desa yang disebutkan di atas ternyata sangat mempengaruhi partisipasi aktif dari masyarakat. Faktor tokoh masyarakat berperan dalam memberikan ajakan dan masukan-masukan membangun di seluruh tahapan pembangunan. Faktor pemerintah kabupaten berperan dalam mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat setempat terhadap berbagai program/kegiatan pengembangan desa wisata selama ini. Faktor pamong desa berperan dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap budaya guyub dan gotong-royong, memfasilitasi serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik atau saran terkait berbagai permasalahan sosial/infrastruktur sehingga nantinya dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan fakta di lapangan, pengaruh tokoh masyarakat berada pada kategori rendah dengan persentase sebesar 87% atau sebanyak 80 orang perwakilan responden memberikan pernyataan tersebut. Kemudian, pengaruh pemerintah kabupaten juga berada pada kategori rendah dengan persentase jawaban yang mendukung pernyataan tersebut sebesar 86% atau sebanyak 79 orang. Sementara, pengaruh yang diberikan oleh pamong desa berada pada kategori tinggi yang merujuk kepada persentase absolut 83% atau total sebanyak 76 responden yang mendukung pernyataan tersebut.

5. REFERENSI

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers (Rajagrafindo Persada).
- Alexander, A. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Penerbit Pondok.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*. *Journal Of The American Institute Of Planners*, 35(November 2012), 37–41.
- Bakri, A. R., Mudikdjo, K., Suratmo, F. G., & Partoatmodjo, S. (1992). *Pengelolaan Sampah Pemukiman dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaannya di Kota Administratif Depok*. Institut Pertanian Bogor.
- Bryson, J. M. (2004). What to do When Stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21–53.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity. *World Development*, 8(3), 213–235.
- Dalimunthe, N. (2007). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Wisata Bahari Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai*. Universitas Sumatera Utara.

- Kriesniati, P., Yuniarti, D., & Nohe, D. A. (2013). *Somers'd Correlate Analysis on The Data Comfortable Level of Students in Plus Melati Samarinda Junior High School*, 7(2), 31–40.
- Prabhakar, A. (2015). *Employee Participation in Management and Study of Its Tools - A Literature Review Study*, 4(1), 23–30.
- Soelaiman, H. (1980). *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung: STKS, 81.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, S. (2003). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Berkelompok*. *Jurnal Tata Loka*, 5(1).
- Verhagen, K. (1980). *How to Promote People's Participation in Rural Development through Local Organisations*. *Review of International Co-Operation*, 73(1), 11–28.